

ABSTRAK

Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya pun alasan perceraianya dengan perzinaan dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak disertai pengaturan rinci mengenai batasan dan standar pembuktiannya sehingga menimbulkan persoalan dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kriteria pembuktian perzinaan sebagai alasan sah perceraian serta menganalisis pertimbangan hakim melalui studi kasus Nomor 5/Pdt.G/2024/PN SMG. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan, literatur, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian perzinaan sepenuhnya merujuk pada hukum acara perdata, khususnya Pasal 164 HIR serta Pasal 1865 dan Pasal 1866 KUHPerdata, sehingga alat bukti yang digunakan meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah dengan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan. Dalam putusan yang dikaji, Hakim menilai keterkaitan antara tangkapan layar percakapan elektronik, keterangan saksi mengenai pertemuan berulang, serta adanya surat pengakuan yang memuat pengakuan telah terjadinya hubungan seksual dengan pihak ketiga sebagai rangkaian bukti yang membentuk keyakinan mengenai terjadinya perzinaan. Penerimaan bukti elektronik tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Perceraian, Perzinaan, Pembuktian, Bukti Elektronik.

ABSTRACT

Divorce is regulated in Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. There is also a reason for divorce due to adultery in Article 19 letter (a) of Government Regulation Number 9 of 1975, but it is not accompanied by detailed regulations regarding the limitations and standards of proof, thus causing problems in judicial practice. This study aims to examine the criteria for proving adultery as a valid reason for divorce and to analyze the judge's considerations through case study Number 5/Pdt.G/2024/PN SMG. The method used is normative juridical research with a legislative and case approach, using secondary data in the form of regulations, literature, and court decisions. The results of the study show that the proof of adultery fully refers to civil procedural law, specifically Article 164 of the HIR and Articles 1865 and 1866 of the Civil Code, so that the evidence used includes letters, witnesses, presumptions, confessions, and oaths with the burden of proof on the party making the allegation. In the decision under review, the judge assessed the connection between screenshots of electronic conversations, witness testimony regarding repeated meetings, and the existence of a confession letter containing an admission of sexual relations with a third party as a series of evidence that formed the conviction regarding the occurrence of adultery. The acceptance of such electronic evidence is based on Article 5 paragraphs (1) and (2) of the Electronic Information and Transactions Law.

Keywords: Divorce, Adultery, Proof, Electronic Evidence.